

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Posisi perguruan tinggi yang semula selalu berada di menara gading kini dituntut riil atas keberadaan lembaganya. Kontribusi lembaga pendidikan tinggi kepada masyarakat menjadi barang taruhan terhadap eksistensi institusi. Perguruan tinggi dinantikan kiprahnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Dunia pendidikan tinggi melalui peran institusi harus berani melakukan rekonstruksi pengelolaan manajemen internal lembaga secara masif. Harapan ke depan, institusi pendidikan tinggi mampu mencetak sumber daya yang dapat menjawab kebutuhan rakyat. (<https://mediaindonesia.com>, 2021).

Menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, termasuk lembaga pendidikan tinggi, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial lembaga pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Salah satunya adalah pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran tahunan dalam bentuk laporan keuangan (Andriani, 2010).

Perguruan tinggi negeri sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membuat dan melaporkan penggunaan anggaran tahunan dalam laporan keuangan. Menurut Mahmudi (2011) bahwa tujuan umum dibuat laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan.

Kualitas laporan keuangan adalah penyampaian laporan keuangan yang akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah (Mardiasmo, 2012).

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sumber daya manusia. Menurut Arfianti (2011) bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberi kontribusi optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sebagian kesatuan sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap pegawai merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memahami dan menerapkan akuntansi dengan baik.

Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia tersebut maka pembuatan laporan keuangan akan lebih efektif dan efisien. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan (Mardiasmo, 2012).

Penelitian mengenai sumber daya manusia di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Zetra tahun 2009 dalam Arfianti (2011), penelitian tersebut dilakukan di 10 Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Di Politeknik Pariwisata Palembang hampir setengah dari jumlah pegawai adalah tenaga honorer, tepatnya sebesar 38,8% dan sebagian besarnya adalah tenaga honorer non keahlian, dengan jenjang pendidikan menengah keatas. Jumlah pegawai yang berstatus ASN dan lulusan S2 perguruan tinggi masih sangat terbatas.

Selain sumber daya manusia, hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Standar Pengendalian Internal (SPI). Menurut Peraturan pemerintah (PP) nomor 60 Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jika penerapan SPI berjalan dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik (Sukmaningrum, 2012). Sistem pengendalian internal di Politeknik Pariwisata Palembang telah diberlakukan dengan baik, akan tetapi belum ada sistem

operasional baku yang diterapkan yang mengikat seluruh pegawai di Politeknik Pariwisata Palembang.

Selain sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal, dalam rangka mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik, perlu implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada laporan keuangan. Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan di atur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang disingkat SAP. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah.

Menurut Ramanda (2015) penerapan SAP adalah untuk memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah. Selain itu, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Fakta dan fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sebelum reformasi belum menggembirakan. Saat itu, akuntansi pemerintahan di Indonesia belum berperan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (Simanjuntak, 2010).

Hal ini dapat dicermati dengan melihat hasil pemeriksaan yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 577 laporan keuangan lembaga pemerintah yang dilaporkan dalam

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011 ditemukan 4.507 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern (BPK RI, 2012). BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 2.319 kasus yang meliputi belanja fiktif, kekurangan volume belanja pekerjaan atau barang, kelebihan pembiayaan, belanja tidak sesuai ketentuan, pembayaran melebihi standar, dengan total kerugian sebanyak 1,66 triliun (BPK RI, 2012).

Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) pada umumnya memiliki pengendalian intern telah memadai. Adapun laporan keuangan yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Masih banyaknya opini tidak wajar (TW) dan tidak menyatakan pendapat (TMP) yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah belum optimal.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata Palembang Tahun Anggaran 2019 oleh Perwakilan BPK-RI Wilayah Sumatera Selatan di Palembang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelaahan atas sistem pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Politeknik Pariwisata Palembang, ternyata belum sepenuhnya mengikuti ketentuan- ketentuan yang berlaku, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan minimal sebanyak 4 (empat) kelemahan. Kelemahan tersebut (BPK RI, 2019) adalah sebagai berikut;

1. Mekanisme penganggaran tidak dilakukan secara cermat dan akurat serta belum sepenuhnya berdasarkan sifat dan jenis penerimaan dan pengeluaran.

2. Pencatatan penggunaan persediaan tidak memadai yang mengakibatkan pengelolaan persediaan rawan penyalahgunaan.
  3. Rancangan Laporan Keuangan berupa Neraca belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai posisi keuangan lembaga sehingga belum menggambarkan struktur kekayaan yang dimiliki oleh lembaga.
  4. Tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara optimal
- Atas kelemahan pengendalian intern tersebut, BPK-RI menyarankan agar pihak bagian keuangan Politeknik Pariwisata Palembang melakukan review atas sistem pembukuan dan penyusunan laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada lembaga pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Politeknik Pariwisata Palembang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat penulis adalah:

1. Apakah sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dalam penggunaan anggaran pada lembaga pendidikan, khususnya di Politeknik Pariwisata Palembang?
2. Apakah sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dalam penggunaan anggaran pada lembaga pendidikan, khususnya di Politeknik Pariwisata Palembang?
3. Apakah standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dalam penggunaan anggaran pada lembaga pendidikan, khususnya di Politeknik Pariwisata Palembang?

4. Apakah sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah secara bersama-sama dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dalam penggunaan anggaran pada lembaga pendidikan, khususnya di Politeknik Pariwisata Palembang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dalam penggunaan anggaran pada lembaga pendidikan, khususnya di Politeknik Pariwisata Palembang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan ilmiah, yaitu sebagai bahan kajian bagi para praktisi dan akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bahan kajian untuk peneliti-peneliti selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik dan lebih khusus terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada lembaga pemerintah.
2. Kegunaan praktis, yaitu sebagai bahan masukan bagi Politeknik Pariwisata Palembang sehingga dapat menjadi titik ukur dalam menilai kinerja aparatur pemerintahan dan perangkat-perangkat organisasi yang terkait di dalamnya dalam mewujudkan *good governance* yang salah satu indikatornya tercermin melalui kualitas informasi laporan keuangan.

### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pembahasan dalam peneliti ini, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada lembaga pendidikan, penelitian ini dilakukan pada Politeknik Pariwisata Palembang.

### **1.6. Susunan dan Struktur Tesis**

Untuk mendapatkan gambaran mengenai isi pokok skripsi yang direncanakan ini, maka berikut ini peneliti mengemukakan sistematika penulisannya.

Bab I : Pendahuluan akan dipaparkan beberapa sub bab yakni : latar belakang masalah yang mengemukakan kondisi yang seharusnya dilakukan dan kondisi yang terjadi saat ini sehingga jelas adanya kesenjangan yang merupakan masalah yang menuntut untuk dicari solusinya. Kemudian dari latar belakang tersebut terdapat tiga rumusan masalah yaitu: apakah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Selanjutnya dikemukakan hipotesis, dilengkapi dengan definisi operasional yaitu definisi-definisi variabel yang menjadi pusat perhatian pada penelitian ini. Tujuan yaitu suatu hasil yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang ada dan kegunaan yaitu suatu hasil yang diharapkan oleh peneliti setelah melakukan penelitian dan diakhiri dengan garis besar isi skripsi.

Bab II : Pada bab ini memuat tinjauan pustaka yang membahas tentang kajian teoritis yang erat kaitannya dengan laporan keuangan pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pengawasan keuangan daerah dan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah serta kajian teoritis yang menjadi dasar dalam merumuskan dan membahas aspek-aspek yang sangat penting untuk diperhatikan sehingga dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.



Bab III : Metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian yang dilaksanakan di Politeknik Pariwisata Palembang. Teknik analisis data yang terdiri atas analisis data deskriptif dan analisis statistik inferensial.

Bab IV: Memuat hasil penelitian yaitu data-data yang diperoleh pada saat penelitian dan pembahasan yang memuat penjelasan-penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian yang terdiri dari analisis deskripsi apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Bab V: Memuat kesimpulan yang membahas tentang rangkuman hasil penelitian berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada dan saran-saran yang dianggap perlu agar tujuan penelitian dapat tercapai dan dapat digunakan sesuai dengan keinginan peneliti.

